

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR (TINGKAT MI/SD)

Fatmawati

MIN 12 Aceh Tengah
fatmawatiurga@gmail.com

Abstrak

Analisis kebijakan tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan pendidikan dasar (jenjang SD/MI). Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah menggunakan studi kualitatif melalui kajian pustaka/dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan melakukan telaah dokumen baik dari dokumen pribadi maupun publik seperti: artikel ilmiah dan regulasi yang berlaku. Dalam kajian ini, Penulis menginventarisir berbagai sumber baik dari buku, jurnal, informasi dari internet, dan Peraturan-Peraturan terkait. Berbagai informasi dari referensi yang relevan tersebut kemudian dilakukan review dan dianalisis. Argumen-argumen kebijakan yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan publik, mempunyai minimal enam unsur, yaitu: (1) Informasi yang relevan dengan kebijakan, (2) klaim kebijakan, (3) Pembenaran, (4) Dukungan, (5) Bantahan, dan (6) Kesimpulan. Argumen kebijakan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan keabsahan (*dialectical function*), optimalisasi simpulam kebenaran, mengajak dan mempengaruhi pihak lain untuk menerima argumen.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Dasar.

Abstract

*Policy analysis does not stop at using various assessment methods to generate and transform information. This study aims to analyze the implementation of basic education policies (SD/MI levels). The research method used in this study is a qualitative study through literature/document studies, namely studies conducted by reviewing documents from both private and public documents such as scientific articles and applicable regulations. In this study, the author takes an inventory of various sources both from books, journals, information from the internet, and related regulations. Various information from the relevant references are then reviewed and analyzed. Policy arguments which are a means to conduct debates on public policy issues, have a minimum of six elements, namely: (1) Policy-relevant information, (2) policy claims, (3) Justification, (4) Support, (5) Rebuttal, and (6) Conclusion. Policy arguments are made to serve as guidelines for action, directing activities in educational organizations to achieve the goals that have been set, increasing the validity (*dialectical function*), optimizing truth conclusions, inviting and influencing other parties to accept arguments.*

Keywords: Education Policy, Basic Education

PENDAHULUAN

Analisis kebijakan tidak berhenti pada penggunaan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi. Meskipun produksi dan transformasi informasi merupakan suatu hal yang esensial dalam analisis kebijakan, yang tidak kalah pentingnya adalah penciptaan dan penilaian secara kritis klaim pengetahuan yang didasarkan atas informasi tersebut. Klaim pengetahuan yang dikembangkan sebagai kesimpulan dari argumen-argumen kebijakan, mencerminkan alasan-alasan mengapa berbagai macam pelaku kebijakan tidak sepakat terhadap suatu alternatif kebijakan.

Argumen-argumen kebijakan, yang merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan publik, mempunyai enam elemen/unsur, yaitu: Informasi yang relevan dengan kebijakan, Klaim Kebijakan, Pembenaran/Warrant, Dukungan/Backing, Bantahan/Rebuttal, dan Kesimpulan/Qualifier. Dihasilkan melalui penerapan berbagai metode merupakan bukti dari kerja analisis. Informasi tentang masalah-

masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi-aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan yang disajikan dalam berbagai bentuk. Informasi yang relevan dengan kebijakan merupakan titik tolak dari suatu argumen kebijakan.

Merupakan kesimpulan dari suatu argumen kebijakan. Klaim kebijakan merupakan konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Jika klaim kebijakan mengikuti penyajian informasi klaim tersebut berbunyi “maka”. Merupakan suatu asumsi di dalam argumen kebijakan yang memungkinkan analisis untuk berpindah dari informasi yang relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Pembeneran dapat mengandung berbagai macam asumsi otoritatif, intuitif, analitis, kausal, pragmatis, dan kritik nilai. Peranan dari pembeneran adalah untuk membawa informasi yang relevan dengan kebijakan kepada klaim kebijakan tentang terjadinya ketidak-sepakatan atau konflik, dengan demikian memberi suatu alasan untuk menerima klaim.

Dukungan bagi pembeneran terdiri dari asumsi-asumsi tambahan atau argumen-argumen yang dapat digunakan untuk mendukung pembeneran yang tidak diterima pada nilai yang tampak. Dukungan terhadap pembeneran dapat mengambil berbagai macam bentuk, yaitu hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. Dukungan terhadap pembeneran memungkinkan analisis bergerak ke belakang dan menyatakan asumsi-asumsi yang menyertainya.

Kesimpulan mengekspresikan derajat dimana analisis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Dalam analisis kebijakan, pemberi sifat sering diekspresikan dalam bahasa probabilitas (seperti “Barangkali”, “Sangat mungkin”, “pada tingkat kepercayaan”). Ketika analisis secara penuh yakin terhadap suatu klaim atau ketika kesimpulan sepenuhnya deterministik dan tidak mengandung kesalahan sama sekali, suatu kesimpulan tidak diperlukan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Fokus pembahasan penelitian berkaitan dengan upaya analisis implementasi kebijakan pendidikan dasar jenjang SD/MI. Sumber data penelitian diperoleh dari sumber kredibel, meliputi *google cendekia*, *DOAJ*, dan *Sinta*. Adapun data yang dimaksud meliputi buku, artikel ilmiah, prosiding nasional atau internasional, dan tugas akhir (skripsi, disertasi atau tesis). Peneliti sebagai instrumen kunci penelitian, mencari kata kunci berupa implementasi kebijakan pendidikan dasar pada laman kredibel, kemudian mengklasifikasi artikel atau data relevan. Selanjutnya, data tersebut akan dinyatakan valid setelah diuji keabsahannya dengan mengkroscek kembali data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pendidikan

Sebuah kebijakan yang diputuskan oleh para perumus tidak serta merta diputuskan tanpa adanya pertimbangan dari nilai-nilai yang mempengaruhinya, faktor yang dimaksud ialah segala hal yang berada di luar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Kustia (2020) menyebutkan ada beberapa faktor lingkungan pendidikan yang meliputi; kondisi sumber daya alam, iklim, demografi, budaya politik, struktur sosial dan kondisi sosial ekonomi.

Adapun kajian pembicaraan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik di bidang pendidikan tentunya tidak terlepas dengan tuntutan percepatan IPTEK yang berkembang di manca negara untuk menghadapi persaingan global, dengan nilai yang telah diungkapkan, di atas maka para aktor yang merumuskan kebijakan menjadi filter yang mampu mencerna masalah yang timbul dengan berbagai kepentingan. Oleh karena itu kebijakan publik untuk pendidikan bisa dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu; *Pertama*, ada kebijakan yang berkenaan dengan fungsi-fungsi esensial dari sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan tersier. Sebagian dari kebijakan ini berhubungan dengan kurikulum, tetapi ini meliputi kebijakan yang berhubungan dengan penetapan tujuan dan sasaran, rekrutmen dan pendaftaran siswa, penilaian siswa, penghargaan dalam bentuk ijasah, diploma, dan disiplin siswa.

Kedua, ada kebijakan yang berkenaan dengan penetapan, struktur, dan pengaturan lembaga individual dan sistem pendidikan yang menyeluruh atau sebagian. *Ketiga*, berhubungan dengan rekrutmen; pekerjaan, promosi, supervisi dan remunerasi seluruh staf, tetapi terutama kategori-kategori berbeda dari para profesional. *Keempat*, kebijakan yang berhubungan dengan ketentuan alokasi sumber keuangan dan ketentuan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan.

Adapun faktor yang sangat mempengaruhi terhadap perumusan kebijakan pendidikan ialah faktor-faktor kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik umumnya dan khususnya segala sesuatu yang menyangkut dengan seluruh perangkat sistem pendidikan baik dengan kualitas guru, mutu pendidikan, anggaran pendidikan

pengembangan kurikulum hingga pada peserta didik. Mengkaji banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan tentunya bukan hal mudah dalam merumuskan sebuah kebijakan harus cermat dan sangat teliti dalam menilai sebuah masalah. Maka tidak heran, jika sebuah kebijakan muncul terkadang disaat masalah yang berkembang sudah kadaluar.

Ada tiga tipe pendekatan berupa dasar pertanyaan dalam analisis kebijakan yang dapat menghasilkan pernyataan berupa klaim dalam argumen kebijakan, yaitu: pertanyaan desainatif atau empiris yang berbasiskan fakta, pertanyaan evaluatif yang berbasiskan nilai, dan pertanyaan advokatif atau normatif yang berbasiskan pada tindakan. Pemahaman tentang sifat ketergantungan nilai dari ilmu sosial merupakan hal yang krusial dalam memahami peran nalar dan etika dalam analisis kebijakan. Tidak ada penyelidikan terhadap suatu masalah kebijakan yang dapat bebas dari pengaruh nilai itu sendiri karena semua bentuk penyelidikan sepenuhnya didasarkan pada keyakinan tentang sifat manusia, masyarakat, pemerintah, dan sifat pengetahuan itu sendiri. Sebab itulah, semua bentuk analisis kebijakan harus dipahami berikut potensi ideologisnya, dalam artian bahwa metode analisis kebijakan dapat menyembunyikan nilai yang sesungguhnya dipegang oleh seorang analis kebijakan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar

Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses kebijakan, suatu kebijakan dirumuskan untuk di implementasikan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan matang, pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan agar tidak terjadi kesenjangan antara rumusan dengan aplikasi dilapangan yang apabila tidak sejalan, maka tujuan tidak bisa dicapai sebagaimana telah dirumuskan. Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Implementasi pada dasarnya adalah sebuah tahapan proses. Proses dalam pengertian ini adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan-tujuan kebijakan yang telah dicanangkan. Kunci keberhasilan dalam upaya implementasi dari kebijakan adalah ditentukan oleh prosesnya, terwujud dalam tahapan-tahapan yang secara teknis berlangsung dalam kegiatan implementasi tersebut.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya (alam, manusia maupun biaya) dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Tahapan ini tentu saja melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Interaksi ketiga unsur tersebut pada akhirnya akan menimbulkan dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Implikasi sebuah kebijakan merupakan tindakan sistematis dari pengorganisasian, penerjemahan dan aplikasi. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Hasil akhir implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk konkret semisal dokumen, jalan, orang, lembaga; keluaran atau outcome yang biasanya berwujud rumusan target semisal tercapainya pengertian masyarakat atau lembaga; manfaat atau benefit yang wujudnya beragam; dampak baik yang diinginkan maupun yang tak diinginkan serta kelompok target baik individu maupun kelompok.

Proses formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan tidaklah bersifat suigeneri dan seteril dari aneka pengaruh eksternal prosesnya dalam ranah dinamik yang rentan terhadap aneka pengaruh kepentingan politik dan birokratik. Mulai dari pemunculan isu, kemudian berkembang menjadi debat publik melalui media massa serta forum-forum terbatas lalu aspirasinya di pertimbangkan oleh partai politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi kebijakan publik pendidikan.

Setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dipublikasikan pada khalayak ramai kemudian dilaksanakan atau diimplementasikan tolak ukur kebijakan pendidikan adalah terletak pada implementasinya. Implementasi kebijakan pendidikan adalah pengupayaan agar rumusan-rumusan kebijakan pendidikan dapat berlaku dalam praktik.

Secara teoritik, kebijakan pendidikan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan lebih bermutu mencakup empat pendekatan implementatif meliputi; *Pertama Struktur Approach*, ialah pendekatan yang bersifat *top-down* yang dikenal dalam teori-teori organisasi modern pendekatan ini memandang bahwa kebijakan pendidikan harus dirancang, diimplementasikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara *structural*. Namun titik lemah dari pendekatan *structural* ini adalah, proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kaku, terlalu birokratis, dan kurang efisien.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah saran yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik organisasi. Ada empat faktor penting dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber, disposisi atau sikap dan struktur birokrasi. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langkah yang memungkinkan, yaitu: langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan harus melibatkan seluruh *stakeholder* yang ada, baik sektor swasta maupun publik secara kelompok maupun individual. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan. Implementasi kebijakan meliputi tiga unsur yakni tindakan yang diambil oleh badan atau lembaga administratif; tindakan yang mencerminkan ketaatan kelompok target serta jejaring sosial politik dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan para stake holder tersebut. Keluaran akhir dari implementasi kebijakan paling tidak terwujud dalam beberapa indikator yakni hasil atau output yang biasanya terwujud dalam bentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiana, T. (2016). Implementasi Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an Metode An-Nahdliyah dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa MTs Al-Ma'arif Tulungagung. *Skripsi*, IAIN Tulungagung. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/3947>.
- Aquami, A. (2017). Korelasi Antara Kemampuan Membaca Al-Qur'an dengan Keterampilan Menulis Huruf Arab pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di Madrasah Ibtidaiyah Quraniah 8 Palembang. *JIP: Jurnal Ilmiah PGMI*, 3(1), 77-88. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jip/article/view/1379>.
- Arsyad, A., & Salahudin, S. (2018). Hubungan Kemampuan Membaca Al-Qur'an dan Minat Belajar Siswa dengan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam (PAI). *Edukasi*, 16(2). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=766270&val=10615&title=hubungan%20kemampuan%20membaca%20al%20quran%20dan%20minat%20belajar%20siswa%20dengan%20hasil%20belajar%20pendidikan%20agama%20islam%20pai>.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Asy-Syahida, S. N., & Rasyid, A. M. (2020). Studi Komparasi Metode Talaqqi dan Metode Tilawati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 186-191. <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/jpii/article/view/192>.
- Fauzan, A. H. (2015). Pola Pembinaan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam*, 15(1), 19-29. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1763811&val=18841&title=POLA%20PEMBINAAN%20BACA%20TULIS%20AL-QURAN%20BTQ%20SEBAGAI%20UPAYA%20PENINGKATKAN%20KEMAMPUAN%20MEMBACA%20AL-QURAN>.
- Fitriani, D. I., & Hayati, F. (2020). Penerapan Metode Tahsin untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 5(1), 15-30. <https://www.ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/jpii/article/view/227>.
- Fuadi, A., Febriyanni, R., & Sabariah, H. (2021). Penerapan Metode Al-Hira' dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa MTs Babussalam. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(4), 287-302. <https://www.bajangournal.com/index.php/JOEL/article/view/693>.

- Hermawan, D., & Jurjani, A (2021). Efektivitas Metode Tilawati dalam Peningkatan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa SDIT Bintang Tangerang Selatan. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 2(1), 168-187. <http://ejournal.alkhairat.ac.id/index.php/JKPI/article/view/35>.
- Ikkbal, M., & Pratami, F. (2022). Penerapan Metode Al-Hira dalam Optimalisasi Membaca Al-Qur'an di Kelas II SD Islam Terpadu Al-Husnayain. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(3), 954-961. <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-madrasah/article/view/1226>.
- Jamhuri, M. J. M. (2016). Penggunaan Metode Drill dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa di SMK Dewantoro Purwosari. *Jurnal Al-Murabbi*, 1(2), 201-216. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/395>.
- Kurniawan, A. (2010). Efektivitas Metode Pembelajaran Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa SMA Fatahillah Ciledug Tangerang. *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1199>.
- Kustianingrum, A. (2020). Peranan Metode Iqro' pada Kemampuan Membaca Al-Qur'an Anak. *Seminar Pendidikan Nasional (Sendika)*, 2(1). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1199>.
- Mahdali, F. (2020). Analisis Kemampuan Membaca Al-Qur'an dalam Perspektif Sosiologi Pengetahuan. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, 2(2), 143-168. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar/article/view/1664>.
- Mufaizin, M., & Arafat, Y. (2020). Implementasi Metode Jibril dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Kelas C2 Tahsin Tilawah Lembaga Takhassusul Qur'an Darul Hikmah. *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 3(01), 39-54. <http://ejournal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/26>.
- Nurhayah, N., & Muhajir, M. (2020). Implementasi Metode Tilawati dan Metode Iqro' dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an. *Qathruna*, 7(2), 41-62. <http://103.20.188.221/index.php/qathruna/article/view/3147>.
- Rizalludin, A. (2019). Implementasi Metode Talaqqi dalam Pembelajaran Tahsin dan Tahfiz Al-Qur'an. *Khazanah Pendidikan Islam*, 1(1), 33-37. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kp/article/view/7138>.
- Suriansyah, M. A. (2020). Implementasi Metode Talaqqi dan Musyafahah dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa di SD Swasta Salsa. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(2), 216-231. <http://jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/fitrah/article/view/27>.
- Suriyanti, L. (2018). Pengaruh Kemampuan Membaca Al-Qur'an Siswa dan Keterampilan Mengajar Guru Terhadap Maharatul Qira'ah Siswa MTs Negeri 4 Bulukumba. *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/8569>.
- Syafei, A., Natsir, N. F., & Jaenudin, M. (2020). Pengaruh Khatam Al-Qur'an dan Bimbingan Guru Terhadap Kemampuan Membaca Al-Qur'an di MTs Nurul Ihsan Cibinong Bogor. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 2(2), 131-150. <https://188.166.217.234/index.php/jdi/article/view/116>.
- Utami, R. D., & Maharani, Y. (2018). Kelebihan dan Kelemahan Metode Talaqqi dalam Program Tahfidz Al-Qur'an Juz 29 dan 30 pada Siswa Kelas Atas Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah. *Profesi Pendidikan Dasar*, 5(2), 185-192. <https://journals.ums.ac.id/index.php/ppd/article/view/7353>.